

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia memiliki keberagaman di dalamnya atau disebut negara multikulturalisme. Dalam konteks ini, konsep multikulturalisme terikat dengan multibahasa, multi-etnis, multi-identitas, multi-agama, dan sebagainya. Data BPS Tahun 2021 menyebutkan terdapat 1.340 suku, 2.500 bahasa, dan keberagaman agama serta kepercayaan. Multikulturalisme dapat berarti pada dua hal yaitu kekayaan atau ancaman. Indonesia dan banyak negara berkembang menjadikan multikulturalisme sebagai sebuah keindahan sekaligus ancaman dengan bergantung pada pengelolaannya.¹ Konsep multikulturalisme sering disikapi dengan prasangka dan kebencian. Pemerintah dapat mengantisipasi hal tersebut dengan cara mengelola multikulturalisme dengan baik dan netral.

Multikulturalisme menyebabkan munculnya berbagai jenis kelompok sosial yang didasari pada kesamaan suku, ras, dan agama. Kelompok dibentuk karena 3 (tiga) kondisi tertentu yaitu, (1) Kelompok yang dibentuk oleh satu orang atau lebih dengan maksud-maksud tertentu; (2) Suatu kelompok yang dibentuk secara spontan; dan (3) Sekumpulan individu menjadi suatu kelompok karena diperlakukan yang sama oleh

¹ Paramitha, Sari dkk. Analysis and evaluation of law number 12 of 2012 concerning higher education based on sports needs for students. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, Volume 18 No.2, 2021, hlm. 191–199.

orang lain.² Kelompok sosial mengakibatkan berbagai macam kondisi salah satunya yaitu kondisi etnosentrisme. Kondisi ini menyebabkan kelompok sosial cenderung membedakan diri mereka di antara kelompok dalam (*ingroup*) dan kelompok luar (*Outgroup*). Akibatnya kelompok seperti ini menciptakan kebanggaan, kesombongan, superioritas, lalu menghina kelompok lain sehingga menimbulkan konflik sosial. Konsep multikulturalisme berkaitan dengan pluralisme. Multikulturalisme dan pluralisme didefinisikan sebagai konsep pengakuan budaya, tetapi memiliki makna yang berbeda. Multikulturalisme memiliki makna pengakuan hak untuk berbeda terhadap keanekaragaman budaya, sedangkan pluralisme memiliki makna kelompok kecil mempertahankan identitas dan nilai-nilai yang diterima oleh masyarakat dominan.³ Multikulturalisme merupakan bagian dari pluralisme. Konflik sosial sering terjadi karena dalam konsep multikulturalisme tidak terdapat pluralisme di dalamnya. Konsep pluralisme tidak hanya menciptakan kelompok-kelompok sosial hidup berdampingan, tetapi menghargai nilai-nilai kelompok lain memiliki kualitas sebagai kelompok dominan.

Multikulturalisme tanpa pluralisme menjadi salah satu penyebab konflik sosial. Hal ini menyebabkan manusia sebagai makhluk konflikologis selalu terlibat dalam perbedaan, pertentangan, dan persaingan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

² Lestari, Mugi, (2011). Dinamika kelompok dan Kemandirian Anggota kelompok Tani dalam Berusahatani di Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah. *Tesis*. Universitas Sebelas Maret : Program Pasca Sarjana

³ Liliweri, Alo. (2018). *Prasangka, Konflik, dan Komunikasi Antarbudaya*, (Jakarta: Prenamedia Group). Hlm. 485

mengartikan konflik sebagai percecokan, perselisihan, dan pertentangan. Sementara, konflik sosial diartikan sebagai pertentangan antar anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan sosial masyarakat. Konflik sosial mengacu pada bentuk gesekan dan ketidaksepakatan yang timbul dalam kelompok ketika kepercayaan atau tindakan satu atau lebih anggota kelompok tidak dapat diterima oleh satu atau lebih anggota kelompok lain. Konflik cenderung disertai kesalahpahaman yang signifikan.

Konflik sosial dapat dipengaruhi karena perbedaan agama atau perbedaan aliran dalam satu agama. Konflik tersebut terjadi karena tidak adanya konsep plural sehingga menganggap bahwa kelompok agama dan aliran mereka yang paling benar. Kementerian Agama mencatat setidaknya terdapat 139 kasus konflik beragama di Indonesia sepanjang tahun 2022. Laporan tersebut mengidentifikasi bahwa tingkat konflik agama di Indonesia cukup tinggi. Konflik agama bermula karena adanya pendangkalan pemahaman agama oleh para pemeluk agama dan formalisasi agama.⁴ Konflik agama di Indonesia dibagi menjadi 6 (enam) jenis konflik yakni moral, sektarian, komunal, politik/kebijakan, terorisme, dan lainnya. Jenis konflik agama sepanjang tahun 2017 hingga 2019 berupa konflik komunal (antaragama) sebanyak 14 kasus dan konflik sektarian (intraagama) sebanyak 12 kasus.⁵

⁴ Khalwani, Ahmad. Penemuan Enam Jenis Konflik Keagamaan di Indonesia, *Jurnal NU 2019*

⁵ Alam, R. H. Sistem Peringatan dan Respon Dini Konflik Keagamaan Fase II: Variasi Efektivitas Respons Dini Konflik Keagamaan, *Jakarta: Balai Litbang Agama Kementerian Agama RI 2019*.

Konflik sektarian mengacu pada konflik yang bersifat politis dan religius, dengan kata lain konflik ini sering terjadi di dunia politik dan agama. Sektarianisme hampir selalu dikaitkan dengan agama pada kajian ilmiah-akademik.⁶ Sektarianisme secara etimologis berasal dari kata sekte, yang bermakna suatu kelompok orang yang memiliki pandangan sama, yang berbeda dari pandangan agama yang lebih lazim diterima oleh penganut agama atau juga lebih dikenal dengan istilah mazhab.⁷ Konflik sektarian rawan terjadi di Indonesia karena masyarakat Indonesia memiliki semangat keagamaan yang tinggi, terlebih Indonesia menjadi penduduk dengan pemeluk agama Islam terbesar di dunia. Masyarakat Indonesia sebesar 231 juta tercatat beragama Islam dengan empat mazhab di dalamnya yang dapat memungkinkan terjadinya konflik sektarian. Sejarah sektarianisme dalam Islam sudah terjadi sejak sepeninggalan Nabi Muhammad SAW karena banyak pertentangan dan perdebatan di kalangan masyarakat.⁸ Pada mulanya sekte dalam Islam muncul bukan sebagai aliran teologi, tetapi gejolak politik menyebabkan sekte-sekte dalam Islam berubah menjadi aliran teologi dengan tujuan menancapkan ideologinya ke dalam masyarakat. Hal ini menjadikan konflik karena perbedaan pemahaman yang bermula di kawasan timur tengah merambah hingga Indonesia.

⁶ Maman Sudiaman. Islam tanpa Sektarianisme, *Jurnal Republika* 2016.

⁷ Azzahra, H. Sektarianisme Dalam Sejarah Islam. *INDO-ISLAMIKA, Volume 2 2019*, hlm. 180

⁸ *Ibid*, hlm. 181.

Kasus konflik sektarian di Indonesia seringkali melibatkan kelompok minoritas seperti Syiah dan Ahmadiyah.⁹ Konflik sektarian di Indonesia yaitu pada tahun 2005 berupa tindak kekerasan dan intimidasi. Puncaknya pada tahun 2011, tiga penganut Ahmadiyah dibunuh di kerusuhan Cikeusik, Jawa Barat. Pada tahun 2011 hingga 2012, kelompok Syiah diserang oleh masa di Sampang, Jawa timur. Konflik tersebut menyebabkan 200 kepala keluarga harus mengungsi karena belum ada penyelesaian secara konkret hingga saat ini. Belakangan ini, konflik sektarian terdapat di Kabupaten Tegal. Laporan Dinas Kesatuan Kebangsaan dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tegal mencatat konflik terjadi di Desa Kalikangkung, Kecamatan Pangkah. Kesbangpol Kabupaten Tegal mengategorikan konflik tersebut sebagai konflik bernuansa agama. Konflik nuansa agama menurut laporan Kesbangpol Kabupaten Tegal sudah terjadi setidaknya dua kali dengan skala konflik yang besar. Konflik pertama terjadi pada tahun 2014. Hal ini karena terdapat indikasi adanya perselisihan antara kelompok aliran agama. *Human Rights Watch (HRW)* mencatat sejumlah konflik yang mengatasnamakan agama terjadi dalam bentuk kesulitan mendirikan tempat ibadah, diskriminasi, hingga kekerasan.¹⁰

Studi terkait konflik umat beragama dilakukan oleh Andrian mengenai pendirian tempat ibadah dan kegiatan beribadah yang ditinjau dari kacamata hukum.

⁹ Wibisono, B. I. & Pasopati, R.U. The Implication of Globalisation in Pattern of Sectarian Violence in Indonesia, *Masyarakat Indonesia, Volume 43 No. 2 2017*, hlm. 234.

¹⁰ United Nation Human Rights Council. (2014). Report of the Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association, *Maina Kiai' Human Rights Council*.

Penelitian ini berfokus pada interaksi internal persekutuan jemaat HKBP terkait adanya penolakan perrizinan peribadahan oleh warga Bogor.¹¹ Kajian ini menguraikan bagaimana implementasi hukum terkait kebebasan beragama dalam konflik, penolakan pembangunan tempat beribadah, dan kegiatan peribadatan. Kajian lain dilakukan Umam mengenai bagaimana komunikasi dalam keadaan tersesat atau *mindlessness* dan terbawa kondisi masa lalu. Studi tersebut menjelaskan konflik berupa pembakaran masjid Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Temanggung Jawa Tengah. Studi Umam menejelaskan bagaimana komunikasi antara aktor pada saat terjadinya konflik.¹² Ariyanto juga melakukan studi terkait adanya konflik antar aliran agama antara Warga Nahdatul Ulama dan Majelis Tafsir Al-Qur'an di Kabupaten Bojonegoro.¹³ Fokus studi tersebut pada kronologi terjadinya konflik, faktor penyebab konflik, dan penyelesaian konflik.

Studi ini memiliki keterkaitan dengan studi Ilmu Pemerintahan. Pierre & Peters menjelaskan bahwa dinamika politik dan pemerintahan dapat dipahami secara lebih komprehensif dengan memasukkan dimensi masyarakat pada disiplin ilmu

¹¹ Andrian, Rudi Ivan., (2018). "Perlindungan hukum Kebebasan Umat Bergama (Studi Kasus Pendirian Tempat Ibadah dan Kegiatan Beribadah Gereja Huria Kristen Batak Protestan Filadelfia di Bekasi dan Gereja Kristen Indonesia Yasmmin di Bogor)". *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang : Progam Sarjana.

¹² Umam, Syaroful. (2011). *Komunikasi Mindlessness Dalam Konflik Antarbudaya: Studi Kasus Pembakaran Masjid Lembaga Dakwah Islam Indonesia (Ldii) Di Desa Tlogowero, Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah* *Skripsi*. Universitas Diponegoro : Progam Sarjana

¹³ Ariyanto, (2012). *Konflik Antar Aliran Keagamaan (Studi Kasus Konflik Warga Nahdatul Ulama dan Majelis Tafsir Al-Qur'an Di Desa Mediyunan Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro)*. *Skripsi*. Intitus Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya : Progam Sarjana.

pemerintahan.¹⁴ Masyarakat menjadi unsur penting dalam kondisi politik dan pemerintahan. Konflik sosial dalam masyarakat dapat menciptakan kondisi yang tidak stabil sehingga berpengaruh terhadap kondisi politik dan pemerintahan suatu negara. Oleh karena itu, studi ini berkaitan erat dengan disiplin ilmu pemerintahan karena dapat menjelaskan mengenai faktor penyebab konflik untuk dijadikan sebagai bahan acuan manajemen konflik. Peran pemerintah dalam manajemen konflik juga diperlukan untuk menciptakan kondisi yang ideal dalam masyarakat.

Penelitian ini berjudul “Konflik Sektarianisme dan Dominasi Masyarakat”. Jika studi sebelumnya memiliki pandangan mengenai segi hukum, komunikasi, dan penyelesaian konflik. Studi ini menyangkut topik sektarian dilihat dari kronologi dan faktor penyebabnya. Kajian ini memiliki urgensi untuk mengungkap faktor penyebab dari akar konflik hingga pemicu konflik menjadi krisis. Kajian ini pula memiliki pembaharuan berupa analisis yang berdasar pada identitas sosial dan dominasi sosial masyarakat di dalam konflik. Hasil kajian ini melengkapi faktor-faktor pada studi lain dengan menggunakan pandangan yang berbeda.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

¹⁴ Masudi, W. Perkembangan Kajian Ilmu Pemerintahan. *Jurnal Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Volume 9 No. 2, 2005*, hlm.226.

1. Bagaimana konflik sektarian di Desa Kalikangkung Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal?
2. Mengapa konflik sektarian di Desa Kalikangkung terjadi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dilakukan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis terjadinya konflik sektarian di Desa Kalikangkung Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal.
2. Untuk menemukan faktor-faktor umum apa yang memicu dan faktor-faktor pemicu terjadinya konflik

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian memberikan manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Studi ini memperkaya kajian tentang konflik yang ada di masyarakat. Konflik memiliki beberapa jenis salah satunya sektarian. Studi ini memberikan kajian mengenai terjadinya konflik sektarian hingga penyebab terjadinya konflik sektarian. Selain itu, studi ini mengungkapkan bagaimana identitas sosial dapat menjadi bumerang bagi masyarakat apabila tidak dapat dikelola dengan baik. Fakta tersebut dapat menambah kajian terkait penyebab terjadinya konflik di dalam masyarakat. Studi ini juga

menjelaskan tentang dominasi suatu kelompok dapat menjadi akar terjadinya konflik. Secara teoritis, studi ini memberikan kajian tentang bagaimana identitas sosial menciptakan dominasi yang dapat menyebabkan konflik sektarian.

2. Manfaat Praktis

Studi ini mengungkap peristiwa konflik yang terjadi di masyarakat. Dari studi disampaikan mengenai terjadinya peristiwa konflik dan faktor-faktor penyebab konflik. Faktor penyebab konflik terdiri dari faktor umum dan faktor pemicu. Kajian ini dapat dijadikan bahan pengambilan kebijakan untuk pemerintah dari tingkat pusat hingga desa dalam mengatasi konflik dengan sikap netral dan berkelanjutan. Studi ini juga memberikan manfaat bagi masyarakat dalam menyikapi konflik sektarian yang terjadi di lingkungan mereka.

1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu tentang konflik di tengah masyarakat telah dilakukan oleh Umam dengan judul “Komunikasi *Mindlessness* Dalam Konflik AntarBudaya : Studi Kasus Pembakaran Masjid Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Di Desa Tlogowero, Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah.”¹⁵ Penelitian tersebut menjelaskan bagaimana pengalaman berkomunikasi orang-orang yang terlibat konflik pembakaran masjid LDII, stereotip dalam kelompok, dan terciptanya

¹⁵ Umam, Syaroful. 2011. Komunikasi *Mindlessness* Dalam Konflik Antarbudaya: Studi Kasus Pembakaran Masjid Lembaga Dakwah Islam Indonesia (Ldii) Di Desa Tlogowero, Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. *Skripsi*. Universitas Diponegoro : Progam Sarjana

komunikasi *mindlessness* di dalam konflik. Pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus digunakan dalam penelitian ini yang disertai dengan teknik analisis logika pencocokan pola. Teori segitiga konflik dari Galtung digunakan peneliti sebagai landasan teori dalam penelitiannya. Galtung dalam Hugh, Oliver dan Tom menjelaskan model konflik simetris dan tidak simetris atau dengan kata lain konflik dalam dilihat sebagai segitiga dengan kontradiksi, sikap, dan perilaku pada setiap sudutnya.¹⁶ Selain itu, peneliti juga menggunakan teori Martin Buber mengenai komunikasi interpersonal sebagai landasan untuk mengetahui hubungan antara pihak melalui pola komunikasi mereka. Teori selanjutnya yang dipakai dalam penelitian konflik pembakaran masjid LDII yaitu teori Pengurangan Tingkat Ketidakpastian yang dikemukakan oleh Gudykunst. Teori ini digunakan sebagai bentuk pemahaman terkait komunikasi antarbudaya yang efektif sehingga dapat mengurangi kecemasan dan kurangnya informasi yang dapat menimbulkan konflik. Temuan penelitian yang dilakukan Umam menunjukkan bahwa terdapat perilaku disfungsional seperti stereotip, prasangka, dikotomi *in group* dan *out group* dalam konflik yang terjadi. Selain itu, tidak adanya sifat terbuka dan inklusif menjadi faktor tersulutnya api konflik sehingga nilai pluralitas dan multikulturalisme dikesampingkan. Relasi komunikasi yang ideal menjadi kunci untuk menghindari konflik dan kebencian di masyarakat yang memiliki perbedaan latar belakang.

¹⁶ Hugh, Oliver dan Tom. (2002). Resolusi Damai Konflik Kontemporer. (Jakarta: Radja Grafindo).

Fenomena konflik karena perbedaan pandangan beragama juga diteliti oleh Budiman tentang “Sekularisasi Dalam Pertarungan Simbolik : Studi Kasus Konflik Keagamaan Jemaat Ahmadiyah di Manislor Kuningan”.¹⁷ Penelitian ini membahas penerapan prinsip sekularisasi dalam menangani konflik keagamaan jemaat Ahmadiyah di Kuningan. Metode yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan etnografi. Data diperoleh melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan tokoh Ahmadiyah, pemerintah, dan Ormas Islam yang berpengaruh di Kabupaten Kuningan. Budiman menggunakan teori modal yang dikemukakan oleh Bourdieu. Teori ini mencakup berbagai macam model untuk mengidentifikasi konflik seperti modal ekonomi, sosial, kultural, dan simbolik. Modal ekonomi menunjukkan bahwa ekonomi dari aktor yang berada di Ahmadiyah memiliki peran penting dalam menunjukkan eksistensi melalui politik, pendidikan, dan sosial. Selanjutnya modal Sosial menunjukkan bahwa jaringan para aktor menjadikan tekanan dari pemerintah daerah dalam penangguhan hak publik tidak berpengaruh pada eksistensi Ahmadiyah di Kuningan. Modal kultural dan simbolik menjelaskan bahwa aktor dalam kehidupan Ahmadiyah di tengah masyarakat cenderung tertutup. Konflik dilandasi karena adanya penangguhan e-KTP dan pencatatan nikah warga Ahmadiyah oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan dan Kementerian Agama Kabupaten Kuningan.

¹⁷ Budiman, A. Sekularisasi dalam Pertarungan Simbolik: Studi Konflik Keagamaan Jemaat Ahmadiyah di Manislor Kuningan. *Tashwirul Afkar*, Volume 39 no. 1, 2020, hlm. 33-57.

Zuldin melakukan penelitian mengenai konflik di masyarakat yaitu tentang “Konflik Agama dan Penyelesaiannya : Kasus Ahmadiyah di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat”.¹⁸ Penelitian ini menguraikan penyebab konflik antara Islam *mainstream* dengan Ahmadiyah, resolusi konfliknya, peran SKB Tiga Menteri tahun 2008 dan Pergub tahun 2011 sebagai media resolusi konflik, dan respons terhadap SKB dan Pergub. Zuldin menggunakan metode penelitian kualitatif fenomenologi model naturalistik dalam penelitiannya. Teori yang digunakan dalam penelitiannya yaitu teori konflik kontemporer yang dikemukakan oleh Karl Marx. Teori tersebut menjelaskan bahwa konflik terjadi sepanjang sejarah manusia karena adanya determinasi ekonomi. Dalam penelitian Zuldin menunjukkan konflik antara Islam *mainstream* dan Ahmadiyah disebabkan oleh aspek teologis yang berkembang menjadi aspek politik, ekonomi, eksklusivitas, dan tidak adanya tokoh pemersatu. Faktor penyebab konflik terjadi yaitu Ahmadiyah dianggap menistakan keyakinan umat Islam dan Ahmadiyah dianggap melanggar SKB dan Pergub. Resolusi konflik yang digunakan yaitu menggunakan mediasi dan peradilan. Konflik berhenti karena akhirnya Ahmadiyah kalah dan menghentikan segala kegiatannya. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu kualitatif melalui pengumpulan dan interpretasi data.

¹⁸ Zuldin, M. Konflik Agama Dan Penyelesaiannya: Kasus Ahmadiyah di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. *MIQOT Volume XXXVII No. 2, 2013*, hlm. 438-448.

Kajian mengenai konflik dilakukan oleh Zaitullah dengan judul “Konflik Sunni-Syiah di Sampang Ditinjau Dari Teori Segitiga Konflik Johan Galtung”.¹⁹ Penelitian ini berisi tentang bagaimana analisis konflik Sunni-Syiah di Sampang yang ditinjau dari pandangan teori segitiga Johan Galtung. Teori yang digunakan yaitu teori segitiga konflik oleh Galtung menjelaskan bahwa selain ideologi, agama menjadi sumber pembawa kekerasan terlebih agama sekaan melegimitasi sekelompok orang untuk menyebarkan keyakinan agama tersebut. Penelitian yang dilakukan Zaitullah menguraikan bahwa konflik antara Sunni dan Syiah bukan sekadar perseteruan saudara, melainkan karena adanya perbedaan ajaran antara Sunni dan Syiah. Selain itu, konflik juga dipicu oleh kebencian mendalam yang dimiliki pengikut Sunni terhadap pengikut Syiah. Konflik tersebut menciptakan terganggunya tatanan sosial yang sudah terbangun lama dan munculnya prasangka yang tidak berdasar.

Kajian lainnya dilakukan oleh Hidayatullah tentang “Konflik Jemaat Ahmadiyah dan Non-Ahmadiyah Di Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan”.²⁰ Penelitian tersebut memuat konflik dan faktor penyebab konflik di Kota Tangerang Selatan antara warga Ahmadiyah dan Non-Ahmadiyah. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hidayatullah menggunakan teori konflik yang dikemukakan oleh Gertz. Teori tersebut

¹⁹ Zaitullah, N. Konflik Sunni-Syiah Di Sampang Ditinjau Dari Teori Segitiga Konflik Johan Galtung. *Jurnal Ilmu Budaya Volume 9, No. 1, 2021*, hlm. 87-100.

²⁰ Hidayatullah. (2019). Konflik Jemaat Ahmadiyah Dan Non Ahmadiyah Di Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta : Progam Sarjana. *Uinjkt.ac.id*. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/46590>

menjelaskan bahwa konflik terjadi karena sikap masyarakat yang tertutup terhadap realitas sosial sehingga suatu kelompok tidak menerima pihak lain yang berbeda dengan kelompoknya. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa konflik di Kota Tangerang Selatan terjadi karena adanya faktor lembaga sosial (keluarga dan pemerintah), faktor ekonomi, dan faktor pendidikan. Faktor keluarga menjelaskan bahwa banyak jemaat Ahmadiyah yang dikucilkan keluarganya sendiri. Pemerintah mengeluarkan surat edaran tentang ajaran Ahmadiyah sehingga menjadi dasar penolakan masyarakat terhadap keberadaan Ahmadiyah. Faktor ekonomi menyebutkan terdapat kecurigaan masyarakat terhadap jemaat Ahmadiyah terkait aliran dana yang berasal dari pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan radikalisme. Terakhir yaitu faktor pendidikan, jemaat Ahmadiyah di Kota Tangerang Selatan dianggap memberikan ajaran-ajaran sesat di dalam pendidikannya.

Diah Wijayana melakukan penelitian dengan judul “Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Masyarakat Minoritas Jemaat Ahmadiyah Studi Kasus: Perusakan Masjid Al-Kautsar milik Jemaat Ahmadiyah di Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal Tahun 2016”.²¹ Studi tersebut menguraikan tentang faktor penyebab terjadinya konflik di Kabupaten Kendal. Wijayana menggunakan teori kekerasan sosial, teori konflik, dan teori Hak Asasi Manusia pada studi yang

²¹ Wijayana, Diah. (2019). Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Masyarakat Minoritas Jemaat Ahmadiyah (Studi Kasus: Perusakan Masjid Al-Kautsar milik Jemaat Ahmadiyah di Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal Tahun 2016). *Skripsi*. Universitas Diponegoro Semarang: Progam Sarjana.

dilakukan. Fokus studi dilakukan pada aspek kepemimpinan, aspek sosial, aspek hambatan, dan respon publik. Konflik tersebut disebabkan karena adanya pembakaran masjid oleh kelompok mayoritas pada kelompok Jemaat Ahmadiyah. Hasil studi Wijayanan menjelaskan bahwa konflik disebabkan oleh 3 (tiga) faktor. Pertama, faktor minoritas menyebabkan Jemaat Ahmadiyah tidak memiliki tempat untuk menyampaikan kehendaknya di ruang publik. Kedua, faktor sosial mengakibatkan Jemaat Ahmadiyah didesak oleh masyarakat sekitar untuk menghentikan pembangunan masjid. Ketiga, faktor agama menganggap kepercayaan Jemaat Ahmadiyah tidak sesuai akidah Islam sehingga menjadi pertentangan.

Kajian ini dilakukan berdasarkan pada urgensi yang berbeda. Peneliti menguraikan tentang kronologi konflik secara mendalam dan faktor penyebab konflik dari akar hingga pemicu konflik. Kajian memiliki urgensi terkait peran identitas sosial dan dominasi sosial dalam konflik sektarian Desa Kalikangkung. Fokus penelitian tersebut dipadukan dengan teori-teori sosial yang relevan. Peneliti dilakun menggunakan metode seperti penelitian-penelitian sebelumnya. Namun, penelitian ini memiliki tujuan ketercapaian yang berbeda. Peneliti memiliki urgensi untuk mengetahui dan menganalisa terkait peran identitas dan dominasi sosial dalam studi ini.

1.6 Kerangka Teori

Studi ini menggunakan 3 (tiga) teori yang berkaitan dengan ilmu sosial. Peneliti menggunakan teori konflik, integrasi sosial, dan identitas sosial dengan penjelasan sebagai berikut:

1.6.1 Konflik

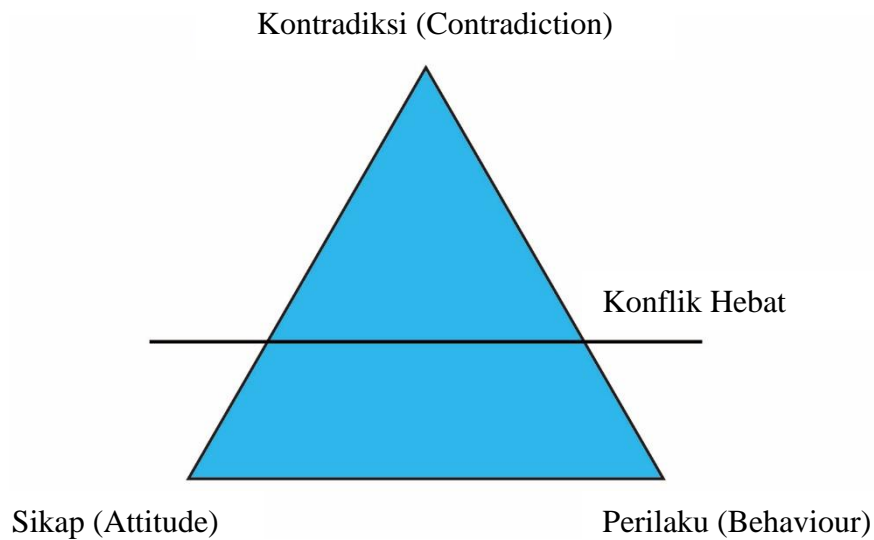
Kehidupan masyarakat majemuk menimbulkan berbagai macam fenomena sosial. Konflik menjadi salah satu fenomena sosial yang muncul di dalam kehidupan masyarakat, baik dalam ruang lingkup yang kecil maupun lingkup yang luas. Konflik akan senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu, di mana saja dan kapan saja beriringan dengan kehidupan masyarakat. Masyarakat menjadi arena konflik yang berlangsung terus-menerus. Hal yang mendorong terjadinya konflik berkaitan dengan perbedaan kepentingan tiap individu dan kelompok. Konflik tidak selalu menimbulkan benturan fisik, tetapi juga bisa berupa diskriminasi di tengah masyarakat.

Johan Galtung menjelaskan model konflik yang dapat dilihat sebagai sebuah segitiga yang sering disebut sebagai teori segitiga konflik dalam bukunya "*Peace by Peaceful Means, Peace and Conflict, Development and Civilization*".²² Teori tersebut menjelaskan bahwa dalam konflik segitiga setiap sudutnya disebut mewakili *attitude* yang terdiri dari asumsi dan sikap, *contradiction* yang menggambarkan perasaan

²² Johan Galtung.(1996). *Peace by Peaceful Means, Peace and Conflict, Development and Civilization*, (Oslo: International Peace Research Institute. hlm. 6-7

frustasi karena tidak terpenuhinya tujuan seseorang atau kelompok, dan *behaviour* atau tindakan agresi seseorang atau kelompok. Lebih lanjut dapat dilihat dalam segitiga di bawah ini:

Gambar 1 Model Segitiga Konflik John Galtung



Mengacu pada gambar segitiga konflik di atas, dijelaskan bahwa terdapat tiga elemen yang ditunjukkan untuk menganalisis sebuah konflik yang terjadi. Pertama yaitu kontradiksi atau *contradiction* merujuk pada dasar situasi konflik akibat ketidakcocokan tujuan oleh pihak yang bertikai. Selanjutnya terdapat *attitude*, pada elemen ini setiap pihak memiliki persepsi satu sama lain sehingga kesalahan persepsi dapat mengakibatkan benturan antara pihak. Persepsi tersebut dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap kelompok lain hingga menciptakan cap tertentu yang belum terbukti kebenarannya atau disebut stereotip. Elemen terakhir yaitu *behaviour*, dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu tindakan dan komunikasi. Tindakan

menyebabkan kekerasan fisik dan komunikasi menyebabkan diskriminasi serta penolakan terhadap suatu kelompok. Dalam teori konflik Galtung, apabila ketiga elemen tersebut terpenuhi maka konflik yang terjadi dapat dikategorikan sebagai konflik hebat.

Galtung menjelaskan bahwa konflik dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu kekerasan langsung, kekerasan budaya, dan kekerasan struktural.²³ Kekerasan langsung pada sebuah konflik dapat menyebabkan jatuhnya korban baik korban jiwa maupun kerusakan materi. Kekerasan langsung juga berpengaruh besar pada kategori konflik yang lain yaitu kekerasan budaya dan struktural. Kekerasan struktural diartikan sebagai kekerasan dalam sebuah struktur sosial yang merugikan kelompok lain dalam masyarakat sehingga masyarakat tidak dapat memenuhi tujuan hidupnya. Kekerasan struktural terjadi dalam bentuk diskriminasi terhadap suatu kelompok. Sementara pada kekerasan kultural mengacu pada kebiasaan masyarakat yang digunakan dalam melegitimasi kekerasan struktural untuk ditunjukkan pada konflik melalui agama, ideologi, dan ilmu empiris. Kekerasan kultural sering terjadi pada negara dengan ekstrimisme agama yang tinggi. Galtung juga menyatakan bahwa selain ideologi, agama merupakan sumber pembawa kekerasan yang tidak dapat dihindarkan.²⁴

²³ *Ibid*, hal. 9

²⁴ *Loc.cit.*

Konflik memiliki beberapa tahapan di dalamnya. Fisher menjelaskan konflik memiliki tahapan yang disebut sebagai dinamika konflik.²⁵ Pertama, tahap prakonflik masyarakat atau kelompok memiliki ketidaksesuaian tujuan dengan kelompok lain sehingga menimbulkan gesekan. Tahap ini memunculkan prasangka kepada satu kelompok yang kemudian menimbulkan diskriminasi. Diskriminasi tersebut memicu terjadinya konflik antar kelompok atau kelompok dengan individu. Kedua, tahap konfrontasi memperlihatkan konflik sudah mulai terbuka. Individu menyebarkan prasangkanya kepada anggota lain dalam kelompok sehingga menimbulkan tindakan-tindakan konfrontatif. Tahap ini memunculkan pertikaian dengan tingkat rendah antar pihak. Ketiga, krisis atau puncak konflik menjadi tahapan dengan tingkat kekerasan tinggi yang dilakukan oleh pihak terkait. Tahapan ini menimbulkan putusnya komunikasi antar pihak karena semakin kuatnya prasangka dan diskriminasi. Keempat, tahapan pascakonflik menjadi tahapan terakhir dalam konflik. Tahap ini menunjukkan ketegangan yang berkurang dan terdapat penyelesaian antara kedua pihak yang berkonflik. Penyelesaian menghasilkan *win-win condition* atau *win-lose condition*. Kelompok konflik mulai menjalani kehidupan secara normal meskipun sentimen dan prasangka kepada kelompok sasaran tidak teratasi sepenuhnya.

Tahapan konflik memiliki peningkatan dan penurunan intensitas dalam peristiwanya. Hal ini berkaitan dengan bagaimana respon antar kelompok yang

²⁵ Fisher, Simon. (2002). *Mengelola Konflik : Ketrampilan & Strategi untuk Bertindak*, (Jakarta: The British Council). Hlm. 83

bertikai. Fisher menjelaskan intensitas konflik sesuai pada dinamika konflik. Intensitas konflik meningkat seiring dengan perjalanan konflik menuju krisis dan menurun seiring berjalannya tahapan pascakonflik.²⁶ Intensitas konflik menjadi tolak ukur untuk mengetahui respon pihak yang terlibat. intensitas konflik yang tinggi menunjukkan respon kelompok semakin marah, sedangkan intensitas rendah menunjukkan ketegangan sudah menurun.

Teori segitiga konflik Galtung digunakan peneliti untuk mengetahui klasifikasi konflik di Desa Kalikangkung, Kecamatan Pangkah. Hal ini berkaitan karena dengan mengetahui jenis konflik yang terjadi dan mengidentifikasi penyebabnya. Teori segitiga konflik Galtung digunakan untuk menganalisis tingkat konflik. Peneliti menggunakan teori dinamika konflik Fisher untuk mengetahui bagaimana kronologi konflik ditinjau melalui tahapan konflik. Teori tersebut juga menjelaskan tentang intensitas konflik Desa Kalikangkung. Kombinasi teori Galtung dan Fisher memudahkan peneliti untuk mengetahui konflik di Desa Kalikangkung.

1.6.2 Identitas Sosial

Identitas sosial dapat diartikan sebagai atribut yang dimiliki oleh seorang individu yang merupakan bagian dari sebuah kelompok sosial. Tajfel dan Turner menjelaskan bahwa individu memiliki sebagian dari konsep dirinya dari

²⁶ *Loc.cit.*

keanggotaannya dalam kelompok sosial.²⁷ Hal ini menjadikan identitas sosial sebagai pengetahuan individu terkait keanggotaannya di dalam kelompok sosial dengan beberapa makna emosional dan nilai keanggotaannya. Identitas sosial sangat berpengaruh apabila individu menganggap keanggotaan di dalam kelompok tersebut merupakan pusat konsep diri dan adanya ikatan emosional yang kuat di dalamnya.²⁸ Teori identitas sosial membahas bagaimana cara identitas sosial dapat mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat mengenai kelompok sosial *in group* dan *out group*.

Terdapat tiga tahapan seseorang dalam mengidentifikasi identitas sosial mereka menurut Tajfel dan Turner.²⁹ Tahapan tersebut yaitu:

1) Kategorisasi Sosial

Kategorisasi mengacu pada kecenderungan individu dalam mengelompokkan antar individu dalam berbagai kelompok sosial yang didasarkan pada persamaan suku, ras, atau agama. Kategorisasi sosial dapat menciptakan stereotip antar kelompok dan individu karena setiap orang dapat teridentifikasi sebagai suatu kelompok dengan norma dan kebiasaan di dalamnya.

²⁷ Tajfel & Turner. (1979). Social Identity Theory In Psychology. *Simply Psychology*. <https://www.simplypsychology.org/social-identity-theory.html>

²⁸ Hogg, M. A. (2021). Self-uncertainty and group identification: Consequences for social identity, group behavior, intergroup relations, and society. *Advances in Experimental Social Psychology*, hlm. 263–316. <https://doi.org/10.1016/bs.aesp.2021.04.004>

²⁹ Mcleod, Saul. Identitas Sosial dalam Psikologi. *Simply Psychology 2023*

2) Identifikasi sosial

Identifikasi menjelaskan individu mengadopsi identitas kelompok tertentu dan menjadi anggota suatu kelompok sosial. Individu akan mulai mengadopsi norma, nilai, dan perilaku suatu kelompok sebagai bentuk karakteristik kelompok mereka. Tahap ini memungkinkan individu memunculkan perasaan emosional dengan suatu kelompok dengan harga diri yang terikat pada keanggotaan kelompok tersebut,

3) Perbandingan sosial

Setelah melalui kedua tahap diatas, maka individu akan mulai membandingkan kelompoknya dengan kelompok lain. Hal ini dapat menimbulkan fanatisme dan melakukan berbagai cara untuk menguntungkan kelompok sendiri. Kelompok satu dan yang lainnya dapat memunculkan prasangka yang menciptakan persaingan antar kelompok dalam rangka mempertahankan harga diri kelompok mereka. Persaingan kelompok tercipta akibat dari persaingan identitas di dalamnya.

Identitas sosial dapat menimbulkan berbagai implikasi di tengah masyarakat. Implikasi dari keberadaan identitas sosial yaitu seperti favoritisme, stereotip, dominasi, dan konflik. Identitas sosial juga dapat menciptakan mobilisasi kelompok sosial dan politik yang dapat menimbulkan radikalisisasi di tengah masyarakat.³⁰ Namun di sisi

³⁰ Huddy, L. From social to political identity: A critical examination of social identity theory. *Political Psychology, Volume 22 no. 1 2001*. hlm. 127-156.

lain, identitas sosial memiliki fungsi bagi individu dalam menumbuhkan rasa percaya diri dan menemukan jati diri. Identitas sosial dapat membantu seseorang dalam berpikir dan bertindak sebagai bagian dari masyarakat.

Peneliti menggunakan teori identitas sosial Turner untuk mengetahui seberapa erat hubungan masyarakat desa Kalikangkung yang dapat memengaruhi emosional masyarakat. Peneliti menggunakan tahapan identifikasi identitas sosial dalam masyarakat sebagai indikator dalam mengetahui hubungan antar individu dalam masyarakat Desa Kalikangkung. Peneliti menggunakan teori ini untuk mengetahui hubungan identitas sosial yang dimiliki masyarakat dengan faktor yang menyebabkan terjadinya konflik. Teori ini membantu peneliti dalam menganalisis tentang identitas sosial dapat menimbulkan dominasi sosial.

1.6.3 Dominasi Sosial

Dominasi sosial atau *sosial domination* merupakan hirarki sosial manusia yang menciptakan perasaan “sewenang-wenang”. Dominasi sosial berbasis pada kelompok sosial. Sidanius & Pratto menyebutkan bahwa dominasi sosial membentuk keyakinan orang untuk berprasangka, seperti rasisme, seksisme, nasionalisme, dan klasisme.³¹ Dominasi sosial suatu kelompok menimbulkan hirarki sosial dalam bentuk diskriminasi dan perilaku asimetris. Kelompok sosial dengan dominasi kuat disebut

³¹ Liliweri, Alo. (2018). *Prasangka, Konflik, dan Komunikasi Antarbudaya*, (Jakarta: Prenamedia Group). Hlm. 485

sebagai kelompok hegemoni. Kelompok hegemoni melibatkan status sosial yang dikelompokkan berdasarkan etnis, kebangsaan, agama, dan sebagainya.

Status sosial menjadikan kelompok hegemoni dapat mendukung hirarki sosial yaitu kelompok 'superior' dapat mendominasi kelompok 'inferior'.³² Kelompok hegemoni dikenal sebagai kelompok penindas dan suka menimbulkan konflik. Kelompok hegemoni dalam dominasi sosial mendapatkan legitimasi mengenai kepercayaan, stereotip, dan ideologi yang dipaksakan. Hal ini diperoleh melalui diskriminasi individu dan institusional terhadap kelompok status rendah. Diskriminasi dilakukan dengan membatasi ruang atau sumber daya suatu kelompok karena perbedaan latar belakang atau nilai-nilai yang dianut.

Dominasi sosial menyebabkan perilaku asimetris dalam kehidupan sosial. Kelompok hegemoni ingin mempertahankan status sosial mereka, sementara kelompok kecil ingin memanjat strata sosial sehingga terjadi gesekan diantara keduanya. Kelompok hegemoni membenarkan perilaku mereka dengan memberikan stereotip negatif, nilai, dan keparcayaan kepada kelompok sasaran. Dalam teori dominasi sosial, kelompok subordinan ingin mempertahankan hirarki sosial mereka dengan mencoba bergabung dengan kelompok status tinggi meskipun hanya karena untuk bertahan hidup.

³² *Ibid*, hlm. 486

Dominasi sosial menjelaskan masalah-masalah dalam kehidupan sosial seperti diskriminasi terhadap kelompok dengan status sosial rendah. Dominasi sosial menjadikan kelompok-kelompok sosial dibedakan menurut kelas sosial, agama, kebangsaan, dan sebagainya. Dominasi sosial menciptakan diskriminasi yang menyebabkan kelompok kecil merasa terasingkan. Hal ini menjadikan dominasi sosial dapat memicu terjadinya konflik antarkelompok. Kelompok dengan dominasi kuat cenderung merendahkan kelompok-kelompok kecil. Kelompok kecil berupaya agar hirarki dalam kehidupan sosialnya tidak hilang. Dua-dua pihak sama egoisnya, mereka ingin mencapai tujuan mereka untuk memudahkan mereka dalam mendapatkan kebutuhan sumber daya.

Peneliti menggunakan teori dominasi sosial untuk membantu dalam mengidentifikasi faktor penyebab konflik. Dominasi sosial menjadi sebuah hirarki yang dapat menimbulkan konflik. Hal ini menjadi acuan apakah terdapat dominasi yang menimbulkan konflik. Teori dominasi berkaitan erat dengan teori identitas sosial. Dominasi sosial muncul karena adanya identitas sosial yang kuat. Hal ini memudahkan peneliti untuk mengidentifikasi faktor terjadinya baik faktor umum maupun faktor pemicu. Ketiga teori digunakan karena menggambarkan pengaruh sebab akibat di dalamnya. Identitas sosial menciptakan dominasi sosial dan dominasi sosial menimbulkan konflik sosial.

1.7 Operasionalisasi Konsep

Studi ini menggunakan konsep konflik sektarian, identitas sosial, dan dominasi sosial. Definisi konsep-konsep tersebut sebagai berikut:

1.7.1 Konflik Sektarian

Konflik memiliki berbagai jenis yang berdasarkan faktor penyebabnya. Konflik karena dipengaruhi faktor agama terbagi menjadi dua yakni konflik komunal dan konflik sektarian. Sektarian memiliki arti sikap atau tindakan yang didasarkan pada afiliasi dalam suatu sekte atau kelompok tertentu. Pada umumnya sektarian berkaitan dengan konteks agama atau politik. Konflik sektarian terjadi karena perilaku eksklusif yang dimiliki suatu kelompok dominan. Hal ini menyebabkan terjadi gesekan antara kelompok yang memiliki perbedaan nilai-nilai di dalamnya. Konteks sektarian di dalam agama merujuk pada perbedaan nilai-nilai dan cara memandang agama yang sama. Hal ini terjadi pada satu agama yang sama dengan aliran atau *mahzab* yang berbeda.

Konsep sektarian dalam konflik terjadi ketika kelompok aliran agama merasa aliran lainnya memiliki nilai diluar akidah yang dianut. Konflik sektarian di Indonesia terjadi pada kelompok-kelompok minoritas islam seperti Ahmadiyah dan Syiah. Kedua kelompok tersebut mendapatkan stereotip kelompok sesat sehingga keberadaanya ditentang oleh kelompok mayoritas seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Pertentangan yang terjadi menyebabkan pecahnya konflik antara

kelompok-kelompok tersebut. Konflik terjadi dalam bentuk diskriminasi, kesulitan mendirikan tempat ibadah, bahkan tindak kekerasan. Kasus tersebut menjadi konflik karena perbedaan nilai dalam satu agama atau disebut sebagai konflik sektarian.

1.7.2 Identitas Sosial

Identitas sosial merupakan atribut yang melekat dalam seorang individu. Identitas sosial terbentuk karena adanya afiliasi dengan kelompok sosial tertentu. Identitas sosial memiliki berbagai aspek yang melatar belakangi individu terafiliasi dengan kelompok tertentu yakni kesamaan bangsa, budaya, ras, suku, agama, dan sebagainya. Identitas sosial memiliki peran dalam membentuk persepsi diri sendiri, interaksi sosial, dan perilaku sosial. Identitas sosial juga memberikan motivasi dalam diri untuk berperan aktif dalam satu kelompok.

Kelompok sosial memiliki identitas sosial kuat sehingga muncul sikap favoritisme kelompok dalam (*ingroup*). Favoritisme memiliki peran sebagai pelindung bagi kelompok dan individu agar eksistensi kelompok tetap terjaga di masyarakat luas. Kelompok sosial memberikan perlakuan khusus bagi anggotanya dengan identitas sosial yang sama dengan cara memberikan sumber daya yang tidak dimiliki kelompok lain. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan status yang lebih tinggi dari kelompok lain. Kelompok luar (*outgroup*) seringkali mendapatkan diskriminasi karena perbedaan identitas yang melekat. Hal ini dipengaruhi oleh kekuatan mayoritas dan minoritas kelompok. Kelompok sosial mayoritas memiliki dominasi yang kuat sehingga

mendapatkan sumber daya lebih banyak dan dapat melakukan diskriminasi kepada kelompok minoritas yang tidak sejalan. Hal ini menimbulkan berbagai macam gesekan dan pertentangan yang diakhiri dengan pecahnya peristiwa konflik antarkelompok.

1.7.3 Dominasi Sosial

Dominasi sosial menjadi hirarki sosial dalam kehidupan masyarakat. Dominasi sosial berafiliasi pada kelompok-kelompok dengan status sosial tinggi. Hal ini menyebabkan timbulnya diskriminasi terhadap kelompok dengan status sosial rendah. Diskriminasi dilakukan dengan membedakan kelompok berdasarkan pada kelas sosial, kebangsaan, agama, dan sebagainya. Diskriminasi timbul karena adanya stereotip negatif terhadap kelompok sasaran. Kelompok dominasi atau kelompok hegemoni mempertahankan kedudukannya di strata sosial. Kelompok kecil atau subordinan mencoba bergabung dengan kelompok hegemoni hanya untuk sebatas bertahan hidup. Perbedaan kepentingan tersebut mengakibatkan gesekan antarkelompok sehingga menimbulkan konflik sosial.

Dominasi sosial berkaitan erat dengan identitas sosial. Identitas sosial memotivasi kelompok untuk mempertahankan status sosial mereka dan membenarkan perilaku kelompok mereka baik untuk kelompok hegemoni maupun kelompok subordinan. Sementara itu, dominasi sosial dilakukan untuk mendistribusikan nilai sosial yang dianut dalam sistem sosial. Dominasi sosial tercipta karena adanya konsep identitas sosial. Kelompok memiliki identitas sosial yang kuat dapat menciptakan

dominasi sosial dalam sistem sosial. Secara garis besar, identitas sosial menciptakan dominasi sosial dan dominasi sosial menciptakan konflik sosial.

1.8 Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian untuk memudahkan proses penelitian dengan metode sebagai berikut:

1.8.1 Tipe Penelitian

Penelitian menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Crasswell penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang – oleh sejumlah individu atau sekelompok orang – dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.³³ Studi ini menggunakan pendekatan studi kasus sehingga dalam studi ini akan berfokus pada kasus yang terjadi di situs penelitian.

Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk mendalami sebuah permasalahan baik individu maupun kelompok tertentu. Penelitian ini digunakan pada penelitian yang berkaitan dengan masalah sosial, situasi, fenomena yang terjadi, tingkah laku, dan masyarakat. Pada penelitian ini, peneliti akan menggali data untuk mendapatkan temuan penelitian yang komprehensif. Penelitian ini

³³ Creswell, J. W. (2016). *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, 4th ed. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

dimaksudkan untuk mengetahui kondisi yang terjadi mengenai objek yang diteliti sesuai fakta yang ada.

1.8.2 Situs Penelitian

Situs penelitian dalam studi ini dilakukan di Desa Kalikangkung, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Situs penelitian berfokus pada lokasi konflik terjadi. Penelitian juga berfokus pada subjek penelitian yang berada di situs penelitian. Dalam situs penelitian, peneliti melakukan wawancara dan pengamatan untuk mendapatkan informasi yang diinginkan.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian menjadi sarana bagi peneliti untuk mendapatkan informasi. Peneliti menetapkan subjek penelitian yang meliputi:

1. Kepala Seksi Kesatuan Bangsa Kesbangpol Kabupaten Tegal.
2. Kepala Desa Kalikangkung, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
3. Tokoh Masyarakat Desa Kalikangkung, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
4. Masyarakat Desa Kalikangkung, Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal.

1.8.4 Jenis Data

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung.

1. Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti yang langsung bersumber dari informan. Data primer didapat melalui teknik pengambilan data seperti wawancara. Peneliti melakukan wawancara terbuka dan mendalam kepada subjek penelitian untuk mendapatkan data primer. Data primer diambil melalui pernyataan dan kesaksian subjek penelitian terkait peristiwa yang terjadi. Data primer juga didapatkan melalui pengamatan langsung terhadap kondisi situs penelitian. Kesaksian dan pernyataan informan menjadi data primer peneliti dalam studi ini.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti. Sumber data sekunder dapat berupa data dokumen, hasil penelitian terdahulu, atau karya tulis yang masih berkaitan dengan topik penelitian yang akan diteliti. Studi ini menggunakan data sekunder berupa buku tentang konflik, dominasi, dan identitas sosial. Selain itu, peneliti menggunakan data sekunder berupa laporan Kesbangpol Kabupaten Tegal terkait peristiwa serupa. Data sekunder digunakan untuk menunjang data primer peneliti.

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

Studi ini menggunakan teknik pengumpulan data yang meliputi:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan tanya jawab (*interview*) yang dilakukan oleh peneliti dan informan. Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan topik penelitian yang akan dibahas. Dalam Teknik wawancara memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terstruktur dan bersifat terbuka yang dirancang untuk memunculkan pandangan serta opini dari para responden (Creswell, 2016). Peneliti melakukan wawancara terbuka dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Informan pada studi ini terbagi menjadi dua yaitu informan dan informan kunci. Wawancara dilakukan kepada subjek penelitian yaitu masyarakat mayoritas, kepala desa, dan pihak Kesbangpol Kabupaten Tegal. Peneliti menggunakan pedoman wawancara agar informasi yang diinginkan dapat terpenuhi.

2. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam dilakukan peneliti terhadap informan kunci. Informan kunci memiliki peran sebagai pusat informasi yang akan membuka semua data yang dibutuhkan peneliti. Studi ini memiliki informan kunci yaitu HR (nama disamarkan atas permintaan informan). HR merupakan ketua pembangunan masjid yang ditentang oleh masyarakat. Peneliti melakukan wawancara secara mendalam dan terbuka untuk

mengetahui segala jenis informasi tentang peristiwa yang terjadi. Wawancara mendalam dilakukan karena topik bersifat spesifik dan sensitif. Tujuan wawancara mendalam dalam studi ini yaitu untuk menggali pendapat dan perasaan informan yang bertentangan.

1.8.6 Analisis dan Interpretasi Data

Menurut Creswel analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus-menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian.³⁴ Pada analisis data kualitatif biasanya meliputi proses pengumpulan data, interpretasi, dan pelaporan hasil secara serentak dan bersama-sama. Analisis data yang dilakukan melibatkan pengumpulan secara terbuka yang didasarkan pada analisis informasi dari para subjek penelitian. Peneliti menggunakan metode triangulasi dalam menganalisis data. Metode triangulasi yang dipakai berupa triangulasi sumber sehingga peneliti akan menganalisis berdasarkan sumber-sumber yang ada baik wawancara maupun pengamatan. Sumber tersebut menghasilkan data-data yang bersifat objektif. Miles Huberman menyebutkan interpretasi data terdiri atas sejumlah tahapan, sebagai berikut:³⁵

1. Reduksi Data

³⁴ Creswell, J. W. (2016). *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, 4th ed. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

³⁵ Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP.

Reduksi data merupakan tahap seleksi data-data yang sudah ditemukan peneliti. Pada teknik ini peneliti memilah data yang relevan dengan topik dan data yang kurang relevan dengan topik penelitian. Data yang relevan dengan topik penelitian akan lebih spesifik sehingga menghasilkan penelitian yang jelas.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahapan lanjutan dari reduksi data. Pada tahap ini mendeskripsikan data yang sudah di reduksi. Pada tahap ini peneliti akan menyajikan data sesuai fakta yang ada di lapangan.

3. Pengambilan Keputusan dan Verifikasi

Teknik pengambilan keputusan dan verifikasi merupakan tahap selanjutnya. Pada tahap ini peneliti melakukan deskripsi ulang mengenai data yang disajikan.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang merupakan tahapan terakhir dilakukan setelah seluruh data dari semua objek penelitian ditemukan. Peneliti pada tahap ini akan melakukan konfigurasi yang merupakan hasil dari data-data yang sudah disajikan.

1.8.7 Kualitas Data

Peneliti menjaga kredibilitas data untuk mendapatkan kualitas data yang diinginkan. Hal ini dilakukan dengan cara menggunakan sumber data yang bervariasi dalam menjelaskan topik penelitian yang diteliti. Peneliti juga melakukan penelitian secara struktural mulai dari pengumpulan data, menganalisis data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan sehingga kualitas data yang diperoleh kredibel.